

PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP
PEMBENTUKAN PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA
TAHUN 1993/I SAMPAI DENGAN 1997/IV

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh

Kalara Sianturi
NIM. 960810201260

Asal	: Hadiah	Klass 339 SIA p
Terima Tgl:	14 OCT 2000	
No. Induk :	10 230 10 / 2000	153

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2000



JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PEMBENTUKAN
PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA
TAHUN 1993/I SAMPAI DENGAN 1997/IV

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Kalara Sianturi

N. I. M. : 960810201260

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

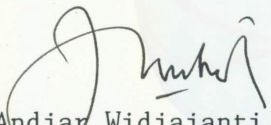
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

16 September 2000

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

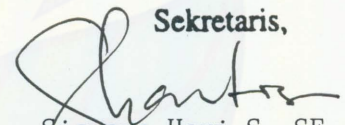
Susunan Panitia Penguji

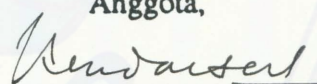
Ketua,


Dra. Andjar Widjajanti, MM.
NIP. 130 605 110



Sekretaris,


Siswoyo Hari S., SE, M.Si.
NIP. 132 056 182
Anggota,


Dra. Ken Darsawarti, MM.
NIP. 130 531 975

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan


Drs. H. Sukusni, M.Sc.
NIP. 130 350 764



TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pembentukan
Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1993/I sampai
dengan 1997/IV
Nama Mahasiswa : Kalara Sianturi
N I M : 960810201260
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Kosentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

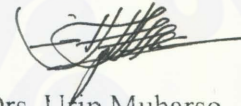
Pembimbing I



Dra. Ken Darsawarti, MM

NIP. 130 531 975

Pembimbing II



Drs. Urip Muharso

NIP. 131 120 333

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM

NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : 19 Agustus 2000

LEMBAR PERSEMBAHAN

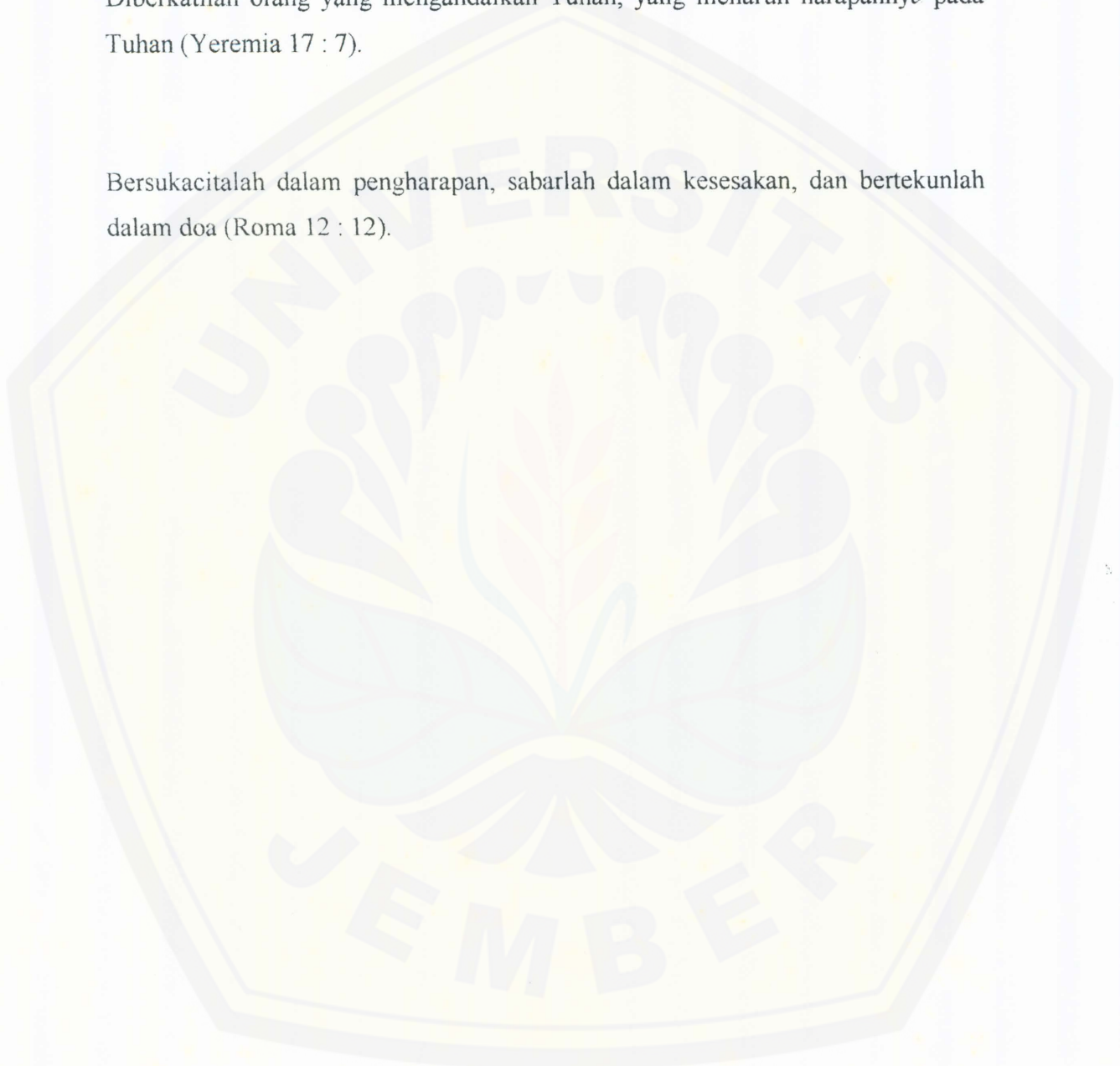


Kupersembahkan skripsi ini teruntuk:
Bapak B. Sianturi dan Mama E. Simanjuntak tercinta
atas segenap doa, motivasi dan kasih sayangnya.
Kakak-kakak dan abangku yang tersayang
Almamater yang kujunjung tinggi

MOTTO

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan (Yeremia 17 : 7).

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa (Roma 12 : 12).



ABSTRAKSI

Pemulihan ekonomi perekonomian dari stagnasi yang terjadi pada awal pembangunan membutuhkan dana yang relatif besar. Lemahnya tabungan dan rendahnya harga barang-barang ekspor mendorong sumber pembiayaan luar negeri menjadi sangat penting. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan tersebut adalah penanaman modal asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 1993 sampai dengan 1997.

Analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda serta ditambah dengan uji statistik yaitu uji t dan uji F, dilanjutkan dengan uji ekonometrik yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data runtut waktu per triwulan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997.

Hasil dari estimasi memperlihatkan bahwa PMA berpengaruh secara nyata (*signifikan*) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto di Indonesia. Untuk uji ekonometrik dalam analisis ini tidak terjadi multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa penaksir telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimation*).

Kata kunci: produk domestik bruto, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, regresi linier berganda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan berkat dan rahmatNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pembentukan Produk Domestik Bruto Di Indonesia Tahun 1993/I Sampai Dengan 1997/IV”.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi dan menyelesaikan gelar sarjana (S1) jurusan Ilmu Ekonomi Study Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ken Darsawarti, MM selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Urip Muharso selaku Dosen Pembimbing II yang tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta seluruh Dosen dan Asisten yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
3. Bapak Direktur BI cabang Jember beserta staf, yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam memberikan fasilitas serta data yang diperlukan;
4. Bapak Drs. Rahardjo dan keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis;
5. Nangboru Tio br. Sianturi dan Inang Tua Dame br. Simanjuntak, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
6. Abang Ronald P.Manurung, SE (*lek*) yang telah memberikan arahan, keceriaan, dan motivasi;

7. Rekan-rekan di Naposobulung IKBP Jember: Kak Artha, Pretty, Melda, Netty, Riri, Dewi, Desy, Saor, Richard, Rahmat, Bahari, Robert, Yeyen, Endang, Melly dan yang lainnya;
8. Teman-temanku, Shinta, Rita, Manis, dan Rini, thank's for everthing
9. Teman-teman seperjuangan SP angkatan '96 dan teman-teman di "Pondok Indah", terima kasih atas segala saran, dorongan dan kebersamaan yang telah dibina;
10. Semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa karya ini belum sempurna, namun besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca terutama pihak yang memerlukannya.

Agustus 2000

Penulis



DAFTAR ISI

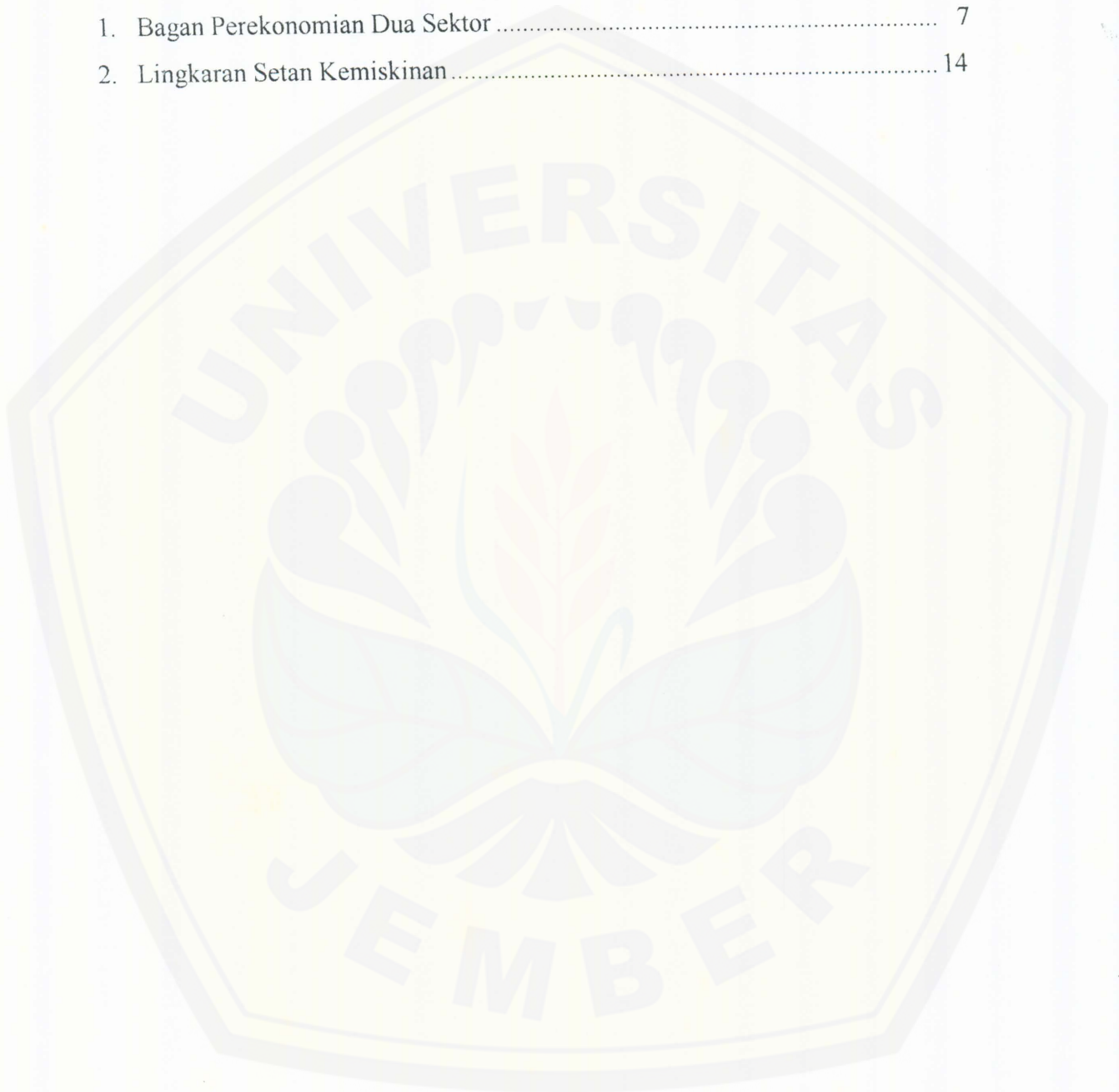
	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	6
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Akumulasi Kapital Menurut Neoklasik.....	6
2.2.2 Akumulasi Kapital Menurut Aliran Strukturalis.....	13
2.2.3 Kontroversi Pendapat Mengenai PMA di NSB.....	17
2.2.4 Kehadiran PMA di NSB.....	20
2.3 Hipotesis.....	22

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
4.1	PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993 sampai dengan tahun 1997.....	32
4.2	Distribusi Persentase PDB Indonesia Tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 Menurut Lapangan Usaha Berdasar Harga Konstan	33
4.3	Daftar PMA yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor Ekonomi	37
4.4	Daftar PMA yang Disetujui Pemerintah Menurut Lokasi	38
4.5	Daftar PMDN yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor Ekonomi	40
4.6	Daftar PMDN yang Disetujui Pemerintah Menurut Lokasi	41
4.7	Analisis Varians Pengujian Regresi Secara parsial	42
4.8	Hasil Regresi Uji Heterokedastisitas.....	45

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Bagan Perekonomian Dua Sektor	7
2.	Lingkaran Setan Kemiskinan	14



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Data Variabel Bebas (PMA dan PMDN) dan Variabel Terikat (PDB) di Indonesia	52
2.	Hasil Regresi Berganda Variabel PMA dan PMDN terhadap Pembentukan PDB di Indonesia	53
3.	Pengujian Kemungkinan adanya Multikolinieritas Variabel PMA dan PMDN terhadap Pembentukan PDB di Indonesia	54
4.	Pengujian Kemungkinan adanya Autokorelasi melalui Uji Durbin-Watson Variabel PMA dan PMDN terhadap Pembentukan PDB di Indonesia	55
5.	Pengujian Kemungkinan adanya Heteroskedastisitas melalui Uji Park Variabel Bebas (PMA dan PMDN) Terhadap Pembentukan PDB di Indonesia	56
6.	Hasil Perhitungan elastisitas Variabel PMA dan PMDN terhadap Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia	57
7.	Kurva Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji-t dua arah pada tingkat keyakinan 95% variabel X_1 (PMA).....	58
8.	Kurva daerah penolakan dan penerimaan H_0 dengan Uji-t dua arah pada tingkat keyakinan 95% variabel X_2 (PMDN).....	59

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses perubahan terus menerus dalam jangka panjang yang dijalankan oleh suatu masyarakat, merupakan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pembangunan Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari keseluruhan usaha pembangunan meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap berikutnya (Sukirno, 1985:14).

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dana yang relatif besar. Usaha pengerahan dana untuk membiayai pembangunan tersebut menghadapi kendala yaitu adanya kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan (Supriyanto dan Sampurna, 1999:1).

Tersedianya modal yang cukup merupakan jaminan bagi kelangsungan pembangunan perekonomian suatu negara. Modal mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan pembangunan karena dengan tersedianya modal yang cukup maka dapat diciptakan faktor-faktor lain yang penting bagi pembangunan, seperti sarana dan prasarana, pengembangan pendidikan, teknologi, penyediaan tenaga ahli, penyelenggaraan administrasi negara, membiayai impor dan lain sebagainya.

Menurut Adam Smith (Sukirno, 1991:286), akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sedangkan kaum Klasik dalam teorinya menyatakan bahwa pembentukan modal merupakan pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Bila kesanggupan ini terus bertambah maka produksi dan pendapatan nasional bertambah sehingga pembangunan ekonomi dapat tercipta.

Berdasarkan sumber modal yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan, usaha pengerahan modal dibedakan menjadi modal dalam negeri dan modal luar negeri. Modal dalam negeri berasal dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa. Hampir semua negara sedang berkembang merasakan bahwa tabungan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai program pembangunan yang direncanakan dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu. Kekurangan modal ini dipenuhi dari modal luar negeri yang berasal dari bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, penanaman modal asing, penanaman modal portofolio, dan pinjaman ekspor.

Apabila dibandingkan dengan modal lainnya, penanaman modal asing lebih menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena selain menyediakan dana, penanaman modal asing juga membawa tenaga manajemen, keahlian keusahawanan, tehnik, pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran barang, transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja dan sumber penerimaan pemerintah berupa pajak. Namun dalam jangka panjang kehadiran penanaman modal asing dapat menimbulkan beberapa akibat yang tidak menguntungkan bagi pembangunan karena penanaman modal asing dapat mengurangi tabungan masyarakat apabila kegiatan yang dilaksanakan mempertinggi konsumsi masyarakat sebagai akibat dari lebih banyaknya barang konsumsi yang tersedia. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing yang ada dapat melemahkan persaingan dan menghambat perkembangan perusahaan nasional yang sejenis karena pengetahuan teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran yang mereka miliki lebih baik daripada perusahaan nasional. Sementara itu arus modal asing lainnya hanya menyediakan dananya saja tanpa disertai sumber daya lainnya seperti penanaman modal asing.

Manfaat penanaman modal asing dalam pembangunan di negara sedang berkembang adalah untuk mengatasi masalah kekurangan dana tabungan dalam negeri (*saving gap*) dan untuk mengatasi masalah kekurangan mata uang asing yang digunakan untuk membiayai impor (*foreign exchange gap*). Kedua masalah ini yaitu *saving gap* dan *foreign exchange gap* disebut sebagai 'masalah jurang ganda' atau *the two gap problem*. Dalam melaksanakan pembangunan untuk

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, pada umumnya negara sedang berkembang tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai pembangunannya sehingga penanaman modal asing dikerahkan untuk menutup kekurangan tersebut. Dalam hal ini penanaman modal asing berfungsi untuk untuk menutup jurang tabungan (*saving gap*) di negara sedang berkembang. Pembangunan ekonomi suatu negara akan meningkatkan impor negara tersebut karena kenaikan pendapatan yang ditimbulkan dari adanya pembangunan akan menambah barang-barang konsumsi dan penanaman modal yang dilakukan memerlukan alat-alat modal serta bahan mentah dari luar negeri. Apabila mata uang asing yang tersedia lebih sedikit dari jumlah yang diperlukan maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal akan rendah. Dalam hal ini penanaman modal asing berfungsi untuk mengatasi masalah jurang mata uang asing (*foreign exchange gap*).

Dalam usaha meningkatkan laju pembangunan nasional, selain terus meningkatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, disadari bahwa sumber pembiayaan dari luar negeri tetap diperlukan. Namun, berkaitan dengan upaya menuju masyarakat yang maju dan mandiri, peran relatif sumber pembiayaan luar negeri diupayakan agar terus menurun. Oleh karena itu, prioritas sumber pembiayaan luar negeri diberikan kepada pembiayaan dalam bentuk investasi langsung atau penanaman modal asing (PMA, *foreign direct investment*) (Dumairy, 1999:109).

Penanaman modal asing didorong bagi kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan yang belum dapat dilakukan oleh modal dan kemampuan luar negeri. Kesadaran akan perlunya PMA didasarkan atas harapan akan dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Dalam rangka itulah diciptakan iklim investasi yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana yang menunjang, serta peraturan yang konsisten sehingga menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi. Kehendak ini telah dibuktikan oleh pemerintah dengan diluncurkannya kebijaksanaan deregulasi, debirokrasi, dan desentralisasi dalam bidang penanaman

modal, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Pada tanggal 10 Juni 1993 (Pakjun 1993), pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan investasi dengan menitikberatkan pada perampingan Daftar Negatif Investasi (DNI), melalui pengurangan bidang-bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing. Tiga bulan kemudian, pemerintah mengeluarkan kembali kebijaksanaan paket deregulasi 23 Oktober 1993 (Pakto 1993) tentang persyaratan kepemilikan satuan perusahaan penanaman modal asing. Kemudian melalui PP No.20 tahun 1994 dikeluarkan kebijaksanaan deregulatif yang memungkinkan pihak asing menanamkan modal 100% di Indonesia.

Akibat kebijaksanaan tersebut, arus modal asing maupun modal dalam negeri mengalami peningkatan. Apabila pada tahun 1993 nilai PMA dan PMDN yang disetujui pemerintah hanya Rp. 17.510 milyar dan Rp. 29.450 milyar, maka pada tahun 1996 dan 1997 meningkat menjadi Rp. 71.828 milyar dan Rp. 101.497 milyar untuk PMA sedangkan PMDN menjadi Rp. 100.715 milyar dan Rp. 119.872 milyar pada tahun yang sama.

Penanaman modal baik PMA dan PMDN ternyata telah turut berperan sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan sehingga dapat tercapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yaitu di atas 5% per tahun. Pada tahun 1992 sampai 1997 perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Sementara itu, pertumbuhan investasi juga meningkat sampai 42,4% (PMA 54,8% dan PMDN 32,6%).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar pengaruh penanaman modal asing terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 1993 /I sampai dengan tahun 1997/IV

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian tentang masalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 1993/I sampai dengan tahun 1997/IV

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian tentang masalah ini adalah:

1. sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan aktivitas penanaman modal
2. sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai hubungan dengan masalah ini



II. Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pernah diteliti dan dibahas oleh beberapa orang sebelumnya. Diantaranya oleh Makmun Murod pada tahun 1997. Studi ini meneliti tentang “Pengaruh PMDN dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Timur Tahun 1984 – 1994”. Peneliti menggunakan alat analisis regresi linier. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa PMDN dan PMA mempunyai pengaruh nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada periode tersebut. Di mana koefisien sumbangan persatuan kapital terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam rangka PMDN masih lebih besar dari besaran sumbangan persatuan kapaital dalam rangka PMA. Hal ini menunjukkan bahwa PMDN lebih berarti daripada PMA sebagai pertumbuhan ekonomi di Jawa timur pada periode tersebut.

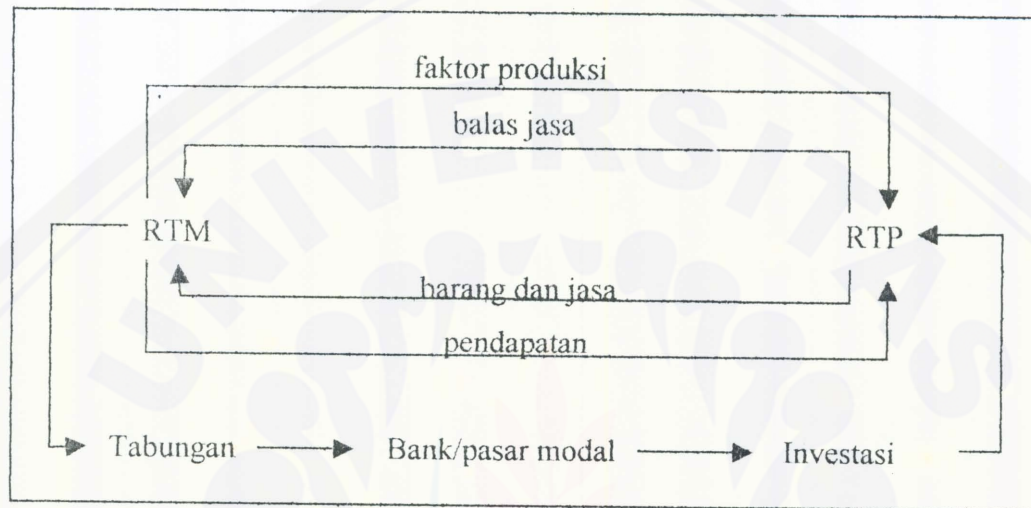
Peneliti lainnya oleh Etik Widiyawati pada tahun 1999. Studi ini meneliti tentang “Pengaruh PMA dan PMDN pada sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 1987 –1996”. Peneliti menggunakan alat analisis regresi linier dan diperoleh hasil bahwa PMA dan PMDN pada sektor industri manufaktur mempunyai pengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Di mana dari uji t dan uji F diperoleh hasil bahwa ada pengaruh signifikan antara PMA dan PMDN pada sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia pada tahun 1987 –1996. Apabila PMA bertambah 100%, diharapkan PDB meningkat sebesar 13,83% dan apabila PMDN bertambah 100%, diharapkan PDB meningkat sebesar 27,75%.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Akumulasi Kapital Menurut Neoklasik

Modal atau permodalan merupakan persediaan faktor produksi secara fisik dapat dihasilkan maupun direproduksi. Jika stock modal tersebut meningkat dalam jangka waktu tertentu dikatakan terjadinya akumulasi modal atau

pembentukan modal. Di negara sedang berkembang, faktor modal dan akumulasi modal serba kekurangan, dimana modal ini memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Kamaluddin, 1998:22). Pada gambar 2.1 dapat kita lihat adanya aliran faktor produksi dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga produksi atau sirkulasi pendapatan yang terjadi di masyarakat.



Gambar 2.1 : Bagan Alir Model Perekonomian Dua Sektor
Sumber : Gilarso, 1992, 41

Untuk dapat melayani permintaan masyarakat akan barang dan jasa, rumah tangga produksi memerlukan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan tanah, modal usaha dan sebagainya. Jasa-jasa produktif yang ditarik dari rumah tangga masyarakat dibayar dengan balas jasa berupa upah atau gaji, laba, sewa, bunga atau deviden. Jadi ada suatu arus jasa-jasa produktif dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga produksi, yang diimbangi dengan arus uang untuk pembayaran dari rumah tangga produksi ke rumah tangga masyarakat. Arus uang pembayaran balas karya ini merupakan penghasilan atau pendapatan bagi rumah tangga masyarakat (Y).

Rumah Tangga Masyarakat (RTM) membutuhkan barang atau jasa dengan membelinya dari rumah tangga produksi. Sebagai akibat transaksi-transaksi mereka maka terjadilah arus barang-barang dan jasa (hasil produksi rumah tangga produksi) dari rumah tangga produksi ke rumah tangga masyarakat melalui pasar

(terjadilah pasar barang-barang dan jasa). Nilai pasar dari nilai tambah keseluruhan barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi disebut dengan *Agregat Supply* (AS). Sebaliknya terjadilah aliran pengeluaran sebagai pembayaran barang-barang dan jasa dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga produksi dimana keseluruhan daripada barang-barang dan jasa yang dibayarkan oleh rumah tangga masyarakat membentuk komponen-komponen *national expenditure*, antara lain *consumption expenditure*, *investment expenditure*, *goverment expenditure*, serta pengeluaran-pengeluaran untuk ekspor dan impor. Jumlah keseluruhan daripada *national expenditure* disebut dengan *Agregat Demand* (AD).

Teori-teori daripada sirkulasi pendapatan ini dibangun dengan asumsi-asumsi, antara lain adalah:

1. Produk yang dihasilkan rumah tangga produksi dianggap homogen
2. Pasarnya dalam bentuk pasar persaingan sempurna
3. Fungsi produksi jangka pendek
4. Linier homogen berderajat satu

Masing-masing individu dalam Rumah Tangga Produksi (RTP) berusaha memaksimalkan keuntungan (profit). Atas dasar asumsi tersebut maka *Agregat Supply* (AS) akan habis terbagi sebagai balas jasa (atas dasar linier berderajat satu) yang diterima oleh pemilik tenaga kerja (upah). Balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi membentuk pendapatan nasional. Pendapatan itu kemudian akan dibelanjakan dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran (*national expenditure* seperti uraian di atas). Namun tidak seluruhnya pendapatan itu dibelanjakan, tetapi ada sebagian yang tidak dibelanjakan dan disimpan dalam bentuk tabungan. Dalam teori Neoklasik, tabungan merupakan fungsi dari suku bunga ($S = i$). Namun dalam teori Keynes, tabungan dinyatakan sebagai fungsi dari pendapatan ($S = Y$).

Di dalam sirkulasi aliran pendapatan, tabungan itu kemudian oleh lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan fungsi *intermediary* berubah menjadi investasi. Berbeda dengan tabungan, dimana tabungan itu merupakan kebocoran maka investasi merupakan injeksi yang bersifat menambah persediaan

barang-barang modal atau perluasan kapasitas produksi pada rumah tangga produksi. Pertambahan stock kapital dalam fungsi produksi akan memiliki *employment effect* bagi tenaga kerja (labour) sehingga baik modal dan tenaga kerja akan bertambah.

Dengan asumsi bahwa fungsi produksi itu linier maka apabila input-input bertambah, output akan bertambah atau *Agregat Supply* (AS) akan bertambah. Selanjutnya pertambahan AS akan habis terbagi sebagai balas jasa yang bertambah dan pendapatan nasional bertambah. Pertambahan pendapatan nasional akan menambah jumlah tabungan. Jumlah tabungan akan menambah investasi dan seterusnya. Oleh sebab itu menurut teori Neoklasik, akumulasi kapital itu bersifat alamiah, otomatis dan kontinu (berkesinambungan).

Sehingga menurut Rostrow, sebagai salah seorang yang digolongkan sebagai pengikut Neoklasik mengatakan bahwa proses akumulasi kapital akan berjalan secara alamiah. Akumulasi kapital yang menyebabkan beberapa negara seperti Eropa Barat (Amerika Serikat dan Jepang) yang selama ini menjadi negara maju bisa diulangi oleh negara sedang berkembang. Menurutnya, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat maju. Proses ini dengan pelbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama di mana pun dan kapan pun juga. Variasi yang ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya berlangsung di permukaan saja (Budiman, 1995:25-26).

Ada lima tahap yang harus dilewati suatu negara dalam proses pertumbuhan ekonomi (dari kutub keterbelakangan ke kutub kemajuan) (Kamaluddin, 1998:94-96):

1. Tahap Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya dibangun di dalam fungsi produksi yang terbatas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi pra-Newton, terhadap dunia fisik. Akan tetapi, konsep tentang masyarakat tradisional itu sama sekali tidak berarti statis, dan konsep itu tidak lalu mengabaikan pertambahan output. Namun kenyataan pokok tentang masyarakat tradisional adalah adanya suatu batas tertinggi untuk tingkat output

dan pendapatan per kapita yang dapat dicapai. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat ini, karena terbatasnya produktivitas, terpaksa menggunakan sebagian besar dari sumber produksinya untuk pertanian. Dari sistem pertanian itu timbul suatu struktur sosial yang hierarkis dengan ruang lingkup yang relatif sempit, tetapi masih dapat terjadi upaya untuk berlangsungnya mobilitas vertikal. Dan memasukkan masyarakat yang sangat beraneka ragam dan yang selalu berubah ini ke dalam suatu kategori yang seragam atas dasar adanya batas tertinggi untuk produksi dan produktivitas teknik ekonomi mereka sangat sedikit artinya.

2. Tahap Peletakan Dasar Untuk Tinggal Landas (*The Preconditions for Take-off*)

Tahap pre-condition atau disebut tahap peralihan (transisi) adalah merupakan tahap untuk meletakkan dasar dan syarat-syarat untuk beralih pada periode berikutnya (tahap *take-off*) dimana perekonomian akan dapat berkembang dengan cukup pesat. Pada tahap ini, di dalam perekonomian dan kehidupan masyarakatnya telah mulai banyak terdapat perubahan-perubahan yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat tradisional, maka mulai terdapat pembaruan-pembaruan dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya yang telah bertambah luas dan telah mulai berkembang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan ekonomi yang lebih maju. Nilai-nilai sosial budaya dan sosial-politis yang lama masih bersifat melekat dan masih besar pengaruhnya dalam menghambat perubahan-perubahan yang radikal sifatnya. Akan tetapi penghalang-penghalang ini selalu mendapat tekanan-tekanan untuk perubahan ke arah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Di samping itu juga telah tercipta peletakan dasar pada kelembagaan perbankan, bidang perhubungan bidang perniagaan, dan sebagainya.

3. Tahap Tinggal Landas (*The Take-off*)

Tahap ini merupakan tahap dimana berbagai penghalang dan rintangan lama ke arah kemajuan dan pertumbuhan perekonomian telah dapat diatasi dan dikuasai. Kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor yang menuju ke arah pembaruan dan kemajuan ekonomi, seperti tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan perbankan, perniagaan,

perhubungan dan sebagainya, telah meluas dan menguasai kehidupan masyarakat. Selama tahap lepas landas ini, terdapat industri-industri baru yang merupakan leading sectors (sektor pemimpin dan penggerak) yang berkembang dengan cepat serta menghasilkan keuntungan-keuntungan besar, di mana pada umumnya keuntungan-keuntungan ini diinvestasikan kembali ke dalam industri-industri yang baru maupun yang semula. Dan demikian seterusnya perkembangan berbagai bidang industri ini dapat mendorong kemajuan dan pembaruan perekonomian nasional untuk selanjutnya.

4. Tahap Gerak Menuju Kematangan (*The Drive to Maturity*)

Dalam tahap gerak menuju kematangan ini, perekonomian negara yang bersangkutan telah “matang”, di mana pemakaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern telah berkembang dan meluas ke seluruh bidang dan sektor perekonomian. Pada tahap ini, perekonomian nasional telah mencapai apa yang disebut sebagai keadaan “momentum” yaitu di mana perekonomian dalam masyarakat yang bersangkutan telah dapat berjalan dan berkembang atas kekuatan sendiri. Jadi perekonomian masyarakat dalam periode ini sudah menimbulkan kekuatan-kekuatan pada dirinya sendiri yang disebut sebagai *self generating forces* yaitu kekuatan-kekuatan yang ada dari lingkungan perekonomiannya sendiri yang mampu untuk bergerak lebih maju dan berkembang dengan sendirinya. Kemajuan ekonomi dan kemakmuran pada tingkat yang sangat tinggi, perekonomian telah maju ke tingkat yang sedemikian rupa sehingga tingkat pendapatan dan konsumsinya telah tinggi sekali, dan pada umumnya setiap penduduk dalam masyarakat dan negaranya telah memiliki tingkat konsumsi berlebihan yang jauh melampaui pemenuhan kebutuhan pokoknya dalam hal makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya. Produksi untuk pemenuhan barang konsumsi kebutuhan pokok pada umumnya telah dapat dipenuhi sepenuh-penuhnya dan sektor produksinya telah banyak bergeser ke arah produksi barang-barang konsumsi yang tahan lama, seperti mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya. Dan produksi sektor jasa-jasa telah berkembang secara meluas dalam perekonomiannya.

5. Tahap Era Konsumsi Tinggi Secara Massa (*The Age of High Mass Consumption*)

Era konsumsi tinggi massa besar-besaran ini ditandai dengan migrasi penduduk ke wilayah pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, serta meluasnya pemakaian barang-barang konsumsi dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini, keseimbangan dan arah perhatian masyarakat beralih orientasinya dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas. Namun demikian, terdapat berbagai kekuatan yang nampak cenderung meningkatkan kesejahteraan di dalam tahap purnamatang ini, yaitu:

- a. penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh yang melampaui batas-batas nasional
- b. ingin menjadikan negaranya sebagai negara kesejahteraan dengan pemeratan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan bagi para pekerja dan masyarakat pada umumnya
- c. keputusan dan upaya untuk membangun pusat-pusat perdagangan dan sektor produksi barang mewah dan canggih seperti mobil, alat komunikasi, bangunan rumah dan sebagainya

Kecenderungan kepada konsumsi besar-besaran atas barang yang tahan lama, ketiadaan pengangguran, dan peningkatan kesadaran akan jaminan sosial, dapat pula membawa masyarakatnya menuju kepada laju pertumbuhan penduduk yang relatif semakin tinggi.

Pertumbuhan ekonomi negara sedang berkembang dapat berhasil jika:

1. mengikuti sistem ekonomi pasar
2. menjelang tahap lepas landas harus dapat memobilisasi tabungan-tabungan masyarakat dan memperbaiki struktur serta kelembagaan institusi

2.2.2 Teori Akumulasi Kapital Menurut Aliran Strukturalis

Menurut paham Strukturalis, proses akumulasi yang digambarkan sebagai suatu proses yang kontinu otomatis akan bisa berlangsung di negara-negara maju, sedangkan di negara-negara sedang berkembang proses akumulasi kapital seringkali berlangsung secara tersendat-sendat dan stagnan karena di negara sedang berkembang berlangsung apa yang dinamakan lingkaran setan kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*).

Menurut Sharp (Kuncoro, 1997:107), penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi adalah:

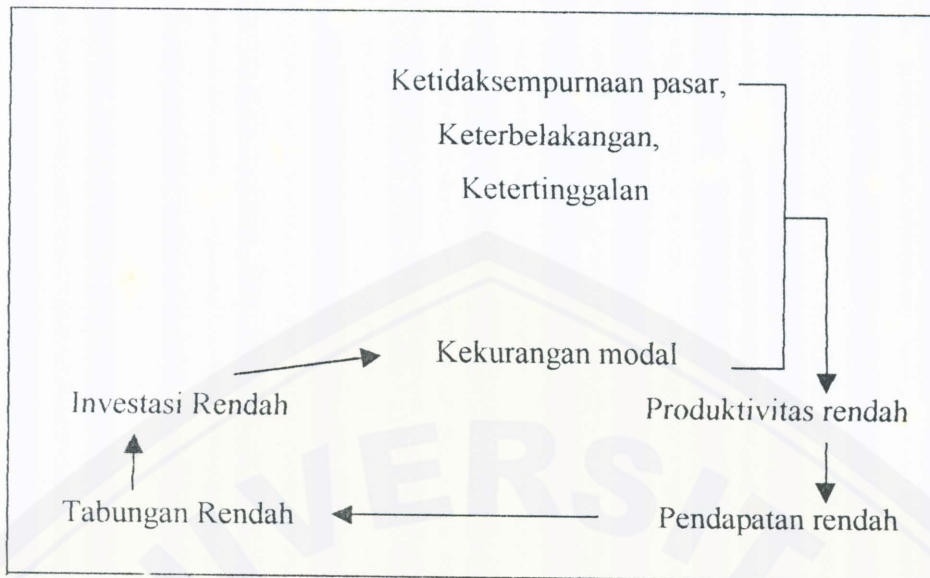
Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam terbatas dan kualitasnya rendah.

Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini. Ragnar Nurkse mengatakan "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).





Gambar 2.2 : lingkaran setan kemiskinan
 Sumber : Kuncoro, 1997, 107

Negara berkembang sampai saat ini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika negara sedang berkembang tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan modal dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya berlangsung dan berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. Pemerintah yang punya hak untuk melakukan tindakan tersebut harus melakukan kebijakan-kebijakan untuk konservasi sumber-sumber dana untuk investasi selain dari tabungan, walaupun tabungan rendah, investasi harus tinggi.

Menurut Rosenstein Rodan (Jinghan, 1999:177), untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu dorongan kuat atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Dalam menekankan ini, ia menarik analogi dengan studi MIT. Ada sejumlah sumber minimum yang harus disediakan jika suatu program pembangunan

diharapkan berhasil. Teori itu menyatakan bahwa cara kerja sedikit demi sedikit tidak akan mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan, tetapi suatu jumlah minimum investasi merupakan syarat mutlak. Disini diperlukan tercapainya ekonomi eksternal, yang timbul dari pendirian secara serentak industri-industri yang secara teknik saling berkaitan. Dengan demikian syarat mutlak seperti itu dan ekonomi eksternal yang mengalir dari sejumlah minimum investasi merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil.

Selain itu, Rosenstein Rodan juga mengemukakan bahwa pembangunan industri secara serentak dan besar-besaran itu akan menciptakan tiga macam ekonomi eksternal yaitu (Kamaluddin, 1998:84):

1. yang diakibatkan oleh perluasan pasar
2. karena industri yang sama letaknya
3. karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut

Namun menurutnya, ekonomi eksternal yang pertama adalah yang paling penting dibandingkan yang lainnya dalam mendukung pembangunan.

Rosenstein Rodan membedakan antara tiga macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal (Jinghan, 1999:177-179):

Pertama, syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi

Jumlah minimal dalam input, output atau proses akan meningkatkan penghasilan di mana peningkatan penghasilan memegang peranan penting di dalam menurunkan rasio modal-output (seperti di Amerika Serikat). Modal overhead sosial merupakan syarat mutlak minimal dan dari ekonomi eksternal pada sisi penawaran. Jasa dari modal overhead sosial yang terdiri dari industri dasar seperti tenaga, angkutan dan perhubungan akan secara tidak langsung bersifat produktif dan mempunyai masa persiapan lama serta tidak di impor. Pembangunannya membutuhkan investasi dengan modal awal yang cukup besar. Dengan demikian kelebihan kapasitas mungkin akan tetap ada pada beberapa waktu. Investasi ini juga mencakup paket industri minimal untuk berbagai pekerjaan umum sedemikian rupa sehingga suatu negara terbelakang harus melakukan investasi antara 30-40% dari total investasinya pada bidang-bidang ini. Oleh karena itu,

investasi ini harus mendahului investasi-investasi produktif yang secara langsung cepat menghasilkan. Modal overhead sosial mengandung empat macam syarat mutlak minimal yaitu:

- a. dilihat dari segi waktu tak dapat diubah lagi dan oleh karena itu harus mendahului investasi lain yang bersifat produktif secara langsung
- b. mempunyai masa pakai minimum, sehingga membuatnya sangat mampat
- c. mempunyai masa persiapan yang lama
- d. terdiri dari suatu paket industri minimal yang tak dapat dikurangi lagi untuk jenis pekerjaan umum yang berbeda-beda. Syarat mutlak minimal pada persediaan modal overhead sosial ini merupakan salah-satu dari hambatan pokok pembangunan di negara terbelakang. Karena itu, diperlukan investasi awal yang tinggi pada modal overhead sosial agar membuka jalan ke arah investasi-investasi produktif yang secara langsung cepat menghasilkan.

Kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan

Syarat mutlak minimal pada permintaan atau saling melengkapinya permintaan, membutuhkan secara serentak industri yang saling berkaitan di negara terbelakang. Maksudnya adalah karena proyek-proyek investasi secara sendiri-sendiri mempunyai resiko tinggi sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produknya akan mendapatkan pasar, maka keputusan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan.

Ketiga, syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan

Elastisitas pendapatan yang tinggi dari tabungan merupakan syarat mutlak minimal yang ketiga. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu tabungan. Jumlah tabungan ini tidak mudah dicapai oleh negara terbelakang yang miskin karena sangat rendahnya tingkat pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, maka ketika pendapatan meningkat sebagai akibat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan. Tetapi tidak ada suatu negara pun yang pernah mempunyai tingkat tabungan marginal yang lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan sebelumnya.

Berdasarkan tiga syarat mutlak minimal diatas dan adanya ekonomi eksternal yang dapat dikembangkannya, maka dorongan kuat atau jumlah minimum investasi merupakan tindakan satu-satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan di negara terbelakang. Sesudah itu mungkin diperlukan adanya syarat mutlak minimal lain yaitu semangat dan dorongan membangun. Tetapi cara kerja sedikit demi sedikit melalui usaha kecil dan tertutup tidak cukup berpengaruh pada pertumbuhan. Iklim pembangunan hanya tercipta bila investasi dilakukan dengan kecepatan tertentu atau ukuran minimum tertentu.

2.2.3 Kontroversi Pendapat di Negara Sedang Berkembang

Menurut Rostrow, seperti yang telah dikemukakan diatas, negara sedang berkembang (terbelakang) akan mengalami proses perkembangan seperti yang dialami oleh negara-negara maju jika mereka dapat melakukan proses pembentukan modal (*capital formation*) secara berkesinambungan (Ikbar, 1995:168). Hal ini menjadi suatu kendala bagi negara sedang berkembang karena kurangnya modal yang diakibatkan tingkat tabungan yang masih rendah. Dalam salah satu tahap pertumbuhan ekonominya, ia menekankan pentingnya penanaman modal sebagai prasyarat utama untuk mencapai lepas landas, karena hanya dengan terciptanya keadaan tersebut perekonomian dapat berkembang. Dalam hubungan ini menurut Rostrow untuk menciptakan kenaikan dalam pendapatan per kapita, maka tingkat penanaman modal yang dilakukan haruslah lebih besar daripada 5,25%.

Selanjutnya ia menganalisis *the inner structure of the take-off*, yaitu mengenai perubahan-perubahan lain yang mengikuti kenaikan tingkat penanaman modal yang berlaku dalam masa lepas landas. Suatu perubahan penting dalam masa ini yang memungkinkan terjadinya kenaikan tingkat penanaman modal yang tinggi adalah berlakunya kenaikan jumlah dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*), dan kenaikan ini berasal dari dua sumber. Pertama, berlakunya perubahan dalam aliran pendapatan, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta dan masyarakat, termasuk perubahan dalam distribusi pendapatan dan impor modal.

Kedua, dari penambahan dana untuk penanaman modal adalah penanaman kembali keuntungan-keuntungan yang diperoleh sektor-sektor perekonomian yang mengalami perkembangan pesat.

Rosenstein Rodan sebagai salah satu pembentuk aliran Strukturalis mengatakan bahwa untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi ke arah kemajuan, memerlukan modal awal yang cukup besar dalam proses industrialisasi di negaranya. Negara-negara sedang berkembang (seperti Indonesia) masih mengalami keterbatasan akan faktor-faktor yang sangat krusial untuk melakukan kegiatan produksi, diantaranya modal.

Di satu pihak orang-orang Liberalis percaya bahwa proses akumulasi kapital itu adalah proses akumulasi yang positif, otomatis, dan berkesinambungan. Di lain pihak, orang-orang Strukturalis mengatakan bahwa proses akumulasi kapital di negara sedang berkembang mengalami proses yang stagnasi karena kesulitan untuk memobilisasi tabungan. Para teoritis yang berpikiran *ecklek*, cenderung merekonsiliasi teori-teori tersebut sehingga mencapai kesimpulan bahwa di negara sedang berkembang harus dapat mengusahakan konservasi sumber-sumber dana investasi selain daripada saving (tabungan) yakni penanaman modal asing diajukan sebagai alternatif pendanaan investasi. Pemikiran itu menimbulkan kontroversi pendapat antara yang pro dan yang kontra terhadap penanaman modal asing. Yang pro mengatakan bahwa penanaman modal asing memberikan aspek positif di dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan yang kontra, terutama yang berkembang di golongan Strukturalis Radikal (NeoMarxis) mengatakan bahwa Penanaman modal asing mempunyai aspek negatif terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Yang pro mengatakan bahwa penanaman modal asing mempunyai aspek positif dengan beberapa argumentasi sebagai berikut (Jinghan, 1999:481-483):

1. membantu kekurangan tabungan domestik melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah sehingga dapat menaikkan laju tabungan marginal dan laju pembentukan modal

2. mengatasi keterbelakangan teknologi, membawa ketrampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk
3. membantu dalam industrialisasi, dalam membangun modal overhead ekonomi dan dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas
4. mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama dengan perusahaan asing
5. meniadakan problem neraca pembayaran dan menurunkan tekanan inflasi
6. membantu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta

Sedangkan yang kontra mengatakan bahwa penanaman modal asing mempunyai aspek negatif dengan beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. dapat mengurus cadangan devisa, seperti teknis operasi, pembayaran tenaga ahli, dan jasa-jasa teknis alih teknologi
2. akan menekan neraca pembayaran pada neraca modal (pelarian modal) melalui:
 - a. keuntungan yang ditransfer ke luar negeri kepada para pemegang saham
 - b. depresiasi, yang dalam prakteknya sering dipakai untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar terhindar dari pajak
 - c. bahan dan alat yang harus didatangkan dari luar negeri yang dalam pelaksanaannya pemerintah harus menyediakan valuta asing
 - d. modal asing berhak sewaktu-waktu untuk menarik modalnya
3. dapat menekan industri dalam negeri dimana lapangan usaha pengusaha-pengusaha nasional akan terpukul oleh persaingan dengan modal asing
4. mengapresiasi surplus ekonomi yang sudah berhasil diciptakan oleh penduduk negara sedang berkembang dengan cara *transfer pricing*, repatriasi laba usaha, memperburuk dasar tukar komoditi ekspor negara sedang berkembang (seperti no.2 di atas)
5. dapat menginternasionalisasi perekonomian negara sedang berkembang, baik di sektor riil maupun sektor keuangan perbankan

2.2.4 Kehadiran Penanaman Modal Asing di Negara Sedang Berkembang: suatu bentuk daripada proses akumulasi global

Andre Gunder Frank sebagai seorang pengamat sejarah perekonomian kapitalis menganalisa tentang gejala krisis dunia yang terjadi dewasa ini. Ia mengatakan bahwa krisis yang terjadi sekarang ini telah terjadi pada masa-masa sebelumnya, yang paling menonjol adalah krisis akumulasi kapital yang berlangsung antara tahun 1873 sampai tahun 1895 (Raharjo, 1994:6).

Krisis yang terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

Pertama, krisis yang diakibatkan oleh kejenuhan pasar

Proses kejenuhan pasar akan diselesaikan dengan cara meluaskan pasar baru. Krisis ini akan terus berulang dan solusinyapun akan terulang kembali. Pada suatu saat nanti perusahaan akan mempertimbangkan pemasaran barang-barangnya di luar wilayah administrasi batas-batas negara dan akan menjangkau negara sedang berkembang sebagai pasar baru.

Kedua, krisis yang diakibatkan karena tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh. Bila Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara terus menerus akan menimbulkan tuntutan kenaikan buruh untuk meningkatkan upah sebagai bentuk distribusi pembagian nilai tambah yang lebih adil. Di pihak lain, posisi tawar menawar dari kelas buruh di negara industri makin kuat, dan mendorong tingkat upah ke atas atau cenderung naik. (walaupun menurut Frank, rasio bagian upah terhadap harga jual adalah kecil dan makin menurun, sejalan dengan meningkatnya harga untuk mencegah menurunnya tingkat laba). Di samping terjadinya peningkatan rasio kapital terhadap tenaga kerja, yang terjadi lainnya adalah situasi dimana industri telah bekerja di bawah kapasitas (terjadi *excess* tapi juga *unused capacity*). Ini semua merupakan sebab pokok dari terjadinya kecenderungan menurunnya tingkat laba. Hal ini mengakibatkan para produsen (atas dasar kemampuan persaingannya secara nasional dan internasional), sebagian produksinya lalu dipindahkan ke negara yang berupah murah (Senghaas, 1988:40). Proses ini biasanya selalu terlihat jika dalam cabang industri yang demikian produktivitasnya kerjanya tidak dapat ditingkatkan di atas rata-rata melalui sebuah peningkatan intensitas modal.

Berhadapan dengan kebutuhan dana pembangunan dan investasi ini, maka terciptalah kelangkaan sumber-sumber dana dunia, walaupun sebenarnya bank-bank swasta internasional kini telah berhasil memupuk sumber-sumber dana yang sangat besar. Di tengah-tengah resesi dan kejenuhan industri modern konvensional, maka bisnis perkreditan atau pasar uang dan modal yang dikuasai oleh beberapa bank-bank dan lembaga keuangan transnasional justru melihat prospek yang cerah di lihat dari sudut permintaan akan sumber-sumber keuangan. Dan kesempatan penanaman modal sudah tentu banyak terbuka di berbagai kawasan dan negara dilihat dari sudut MNC (Multi National Company). Situasi tersebut menampakkan adanya pertemuan kepentingan antar kekuatan bisnis nasional dan MNC.

Pemerintah dan dunia bisnis nasional membutuhkan partner untuk membangun industri-industri baru bagi pasar dunia atau untuk membangun industri hulu. Di pihak lain, perusahaan-perusahaan MNC yang terpojok dalam persaingan di kandang sendiri, merasa perlu untuk melakukan pemindahan industrinya ke negara-negara sedang berkembang yang sudah maju atau membina sistem internasional *sub-contracting* dengan perusahaan-perusahaan nasional. Di samping untuk mendekati bahan baku dan pasar serta memperoleh buruh murah, mengurangi ongkos pencegahan polusi yang begitu besar di negara-negara maju, pengalihan lokasi industri itu juga merupakan cara yang sangat cerdas untuk bisa mempergunakan dana lokal dari negara-negara yang telah berhasil melakukan proses akumulasi modal swasta dalam jumlah yang cukup besar.

Ada dua gejala yang tampaknya saling bertentangan dalam ekspansi ekonomi internasional itu. Di satu pihak, ekspansi memang didorong oleh kompetisi yang ketat di antara raksasa-raksasa ekonomi itu dan masing-masing mencari jalan keluar untuk bisa lebih produktif atau efisien. Tetapi di pihak lain, juga untuk mengatasi kompetisi, di antara perusahaan-perusahaan itu terjadi proses konsentrasi, merger, dan aglomerasi serta membentuk aliansi permodalan, baik di antara MNC sendiri maupun dengan partner lokal, dalam bentuk cartel, syndicate dan concern yang tidak lain merupakan bentuk konsentrasi modal dan kekuatan ekonomi. Namun kesemuanya itu hanya menggambarkan suatu gejala

yang tunggal, yaitu globalisasi dunia usaha yang mencaplok perekonomian-perekonomian nasional (Raharjo, 1994:72-73). Atau terdapat suatu proses yang disebut gerakan modal (reproduksi dinamika capital) di dalam proses akumulasi kapital di negara maju, di mana di negara sedang berkembang dijadikan suatu solusi untuk mengatasi krisis yang oleh orang-orang Marxis disebut sistem ekonomi kapitalis telah mencapai suatu proses akumulasi kapital yang berskala global.

2.3 Hipotesis

Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 1993/I sampai dengan tahun 1997/IV

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 dengan pertimbangan bahwa selama periode tersebut baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri terus mengalami peningkatan dan pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan berupa Pakjun dan Pakto pada tahun 1993. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, tempat dan kegiatan penelitian di wilayah kerja Bank Indonesia cabang Jember. Hal ini disebabkan karena penelitian yang dilakukan menyangkut kebijaksanaan makro pemerintah. Maka data-data dari variabel pengamatan pada Bank Indonesia hampir tersedia di seluruh cabang-cabang.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu (time series) tahunan yang diperoleh dari studi literatur pada instansi-instansi seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), serta dari sumber-sumber lain yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diuji.

3.3 Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian serta meluasnya masalah, maka perlu pembatasan-pembatasan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. PMA adalah penanaman modal yang disetujui pemerintah dan dilakukan secara langsung oleh investor luar negeri dalam berbagai sektor perekonomian Indonesia kecuali yang dinyatakan tertutup bagi kegiatan PMA dan dilaksanakan berdasar ketentuan UU no.1 tahun 1967 jo UU no.11 tahun 1970 dan berbagai kebijaksanaan investasi lainnya. Modal yang diinvestasikan minimal sebesar US \$ 1.000.000 dan pemilik modal bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari kegiatan penanaman modal tersebut yang dinyatakan dalam milyar rupiah per tahun.

2. PMDN adalah penanaman modal yang disetujui pemerintah dan dilakukan secara langsung oleh investor dalam negeri dalam berbagai sektor perekonomian Indonesia kecuali yang dinyatakan tertutup bagi kegiatan PMDN dan dilaksanakan berdasar ketentuan UU no.7 tahun 1968 jo UU no.12 tahun 1970. Pemilik modal bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari kegiatan penanaman modal tersebut yang dinyatakan dalam milyar rupiah per tahun.
3. PDB adalah nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan atau diproduksi selama triwulanan dan diperoleh dari 9 sektor yang ada di Indonesia berdasar harga konstan.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Untuk mencapai tujuan penelitian, dirancang suatu persamaan regresi linear berganda (Multiple Linear Regression) sebagai berikut (Supranto, 1995:189):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

dimana :

- Y = Produk Domestik Bruto (dalam milyar rupiah)
- a = Intercept yaitu besarnya Y pada saat X_1 dan X_2 dianggap sama dengan nol
- b_1 = koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan PDB Indonesia sebagai akibat adanya perubahan PMA
- b_2 = koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan PDB Indonesia sebagai akibat adanya perubahan PMDN
- X_1 = Penanaman Modal Asing (dalam milyar rupiah)
- X_2 = Penanaman Modal Dalam Negeri (dalam milyar rupiah)
- e = Variabel pengganggu

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PMA terhadap pembentukan PDB maka digunakan rumus elastisitas sebagai berikut (Sudarman, 1991:94):

$$E_1 = b_1 \cdot \frac{X_1}{Y}$$

Alat analisa kedua ini dijelaskan sebagai pembanding, karena di dalam penelitian ini tidak secara eksplisit mencari besarnya pengaruh PMDN. Besarnya pengaruh PMDN terhadap pembentukan PDB dijelaskan sebagai berikut:

$$E_2 = b_2 \cdot \frac{X_2}{Y}$$

dimana:

b_1 = koefisien regresi PMA

b_2 = koefisien regresi PMDN

X_1 = rata-rata nilai PMA tahun 1993/I sampai dengan tahun 1997/IV

X_2 = rata-rata nilai PMDN tahun 1993/I sampai dengan tahun 1997/IV

Y = rata-rata nilai PDB tahun 1993/I sampai dengan tahun 1997/IV

3.4.2 Uji statistik

A. Untuk menguji pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t (Supranto, 1995:143):

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{Sb_i}$$

dimana:

b_i : koefisien regresi

Sb_i : standart deviasi dengan derajat keyakinan 95%

Kriteria Pengujian:

$H_0 : b_i > 0$

$H_0 : b_i \leq 0$

Keputusan:

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima maka variabel bebas (variabel X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (variabel Y)
 - b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak maka variabel bebas (variabel X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (variabel Y)
- B. Untuk menguji adanya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas (PMA dan PMDN) terhadap pembentukan PDB digunakan uji F (Supranto, 1995:258):

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

n : banyaknya populasi

k : banyaknya variabel

Kriteria Pengujian

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$

$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$

Keputusan :

- a. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y
- b. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y

- C. Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara keseluruhan dari variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan koefisien determinasi R^2 dengan perumusan modelnya sebagai berikut (Supranto, 1995:96) :

$$R^2 = \frac{b_1 \sum xy + b_2 \sum x^2 y}{\sum y^2}$$

3.4.3 Uji Ekonometrik

A. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai R^2 , F hitung serta t hitung. Kemungkinan adanya multikolinearitas jika R^2 dan F hitung tinggi sedangkan nilai t hitung banyak yang tidak signifikan. Untuk mengetahui apakah di dalam penelitian ini dijumpai adanya multikolinearitas digunakan metode regresi turunan (*Auxiliary Regression*). Multikolinearitas terjadi di antara variabel X. Uji regresi turunan diperoleh dari nilai R^2_i hasil regresi turunan antara X_i dengan variabel penjelas yang lain. Apabila F_i hitung $>$ F tabel maka X_i berkorelasi dengan variabel penjelas yang lain (Sugiyanto, 1994:82-84).

B. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Untuk mengetahui apakah dalam penelitian ini dijumpai adanya autokorelasi maka digunakan uji Durbin-Watson (Sugiyanto, 1994:78-80).

C. Uji Heteroskedastisitas

Kasus heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varians yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tetap tidak bias tetapi tidak efisien. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi digunakan



uji Park (*Park test*) (Sugiyanto, 1994:81). Park mengasumsikan bahwa σ^2 merupakan fungsi dari variabel-variabel bebas. Oleh karena itu σ_i^2 umumnya tidak diketahui, maka ini dapat ditaksir dengan menggunakan e_i^2 sebagai *proxy*. Metode Park mengandung prosedur dua tahap. Dalam tahap pertama, melakukan perhitungan regresi untuk suatu metode regresi tanpa mempersoalkan apakah situasi heterocedasticity ada atau tidak. Dalam tahap kedua, dengan melakukan regresi setiap X (Arief, 1993:33-34).



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Yang Diteliti

4.1.1 Perkembangan Perekonomian Indonesia

Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 1993–1997 tidak bisa terlepas dari keadaan perekonomian Indonesia masa sebelum dan sesudah berakhirnya boom minyak. Pada masa boom minyak yaitu sekitar tahun 1975 sampai 1986 harga minyak bumi di pasaran internasional mengalami kenaikan yang pesat sehingga mampu mendorong meningkatkan kegiatan produk nasional dan merupakan sumber devisa yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan.

- Pada periode tahun 1970-an, sektor migas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan merupakan kekuatan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumbangan sektor migas terhadap total nilai ekspor Indonesia pada tahun 1970 adalah sebesar 37%, kemudian pada tahun 1975 sebesar 75%, sampai pada akhirnya pada tahun 1981 sumbangan sektor migas dapat mencapai 82% dari seluruh penerimaan dalam negeri Indonesia. Sedangkan pada tahun 1990 menurun menjadi 45,4%. Perekonomian Indonesia pada akhirnya sangat bergantung pada hasil ekspor migas dan komoditas sektor primer terutama pertanian. Ketergantungan ini mempunyai dampak yang kurang baik bagi Indonesia, karena ekonomi Indonesia sangat terpengaruh terhadap perubahan harga komoditas tersebut.

Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara HPEs (*High Performing Asian Economics*), sebagai kelompok negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Walaupun tingkat pertumbuhan Indonesia tidak lebih tinggi dari Thailand, namun dapat menyaingi negara-negara berkembang maupun negara-negara industri utama (di luar Jepang).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut sektor ekonomi atas dasar

harga konstan tahun 1993 pada tabel 4.1. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 1993, mencapai angka sebesar Rp 139.707,10 milyar. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan berbagai sektor ekonomi yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Masing-masing sebesar Rp 24.569,30 milyar, Rp 29.484,40 milyar dan Rp 22.850,10 milyar. Ketiga sektor tersebut memberikan sumbangan terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sampai dengan tahun 1997. Kondisi itu menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1997, masih mempunyai ciri-ciri sebagai negara yang menitikberatkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, karena terjadi perubahan-perubahan akibat adanya berbagai kebijaksanaan dan deregulasi dalam bidang ekonomi, dan usaha pemerintah mempersiapkan diri dalam memasuki Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II dan menghadapi persaingan era pasar global.

Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan dalam kerun Orde Baru, ternyata telah merubah sektor ekonomi Indonesia. Perubahan sektor ekonomi ini ditandai dengan perubahan komposisi lapangan usaha atas kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pada tahun 1970-an, kontribusi sektor pertanian sekitar 60% dan pada tahun 1980-an tinggal sekitar 25%. Sedangkan pada tahun 1996 mengalami penurunan menjadi 16,30%. Sementara itu, kontribusi sektor industri yang semula hanya 7% meningkat menjadi 14%. Sehingga dominasi produk yang dihasilkan perekonomian nasional mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri. Pada tahun 1993, kontribusi sektor pertanian 17,59%, dan sektor industri 21,10%.

Perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural ditandai dengan beberapa ciri, yaitu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk, kontribusi sektor primer menurun, dan kontribusi sektor industri meningkat, sedangkan kontribusi sektor jasa relatif konstan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada awal tahun

1990-an. Dimana komposisi sektor-sektor ekonomi yang paling besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, dan jasa. Keadaan ini membawa Indonesia menjadi negara semi industri atau negara industri baru dan meninggalkan ketergantungan terhadap sektor migas dan sektor primer yaitu pertanian. Dimana pada kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi industri pengolahan dalam mendukung pembangunan nasional.

Ciri utama negara industri baru adalah laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan didukung industri oleh kontribusi sektor industri manufaktur paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan laporan bank dunia, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dikawasan ASEAN selain Singapura, sebenarnya telah memberi prospek bagi beberapa negara termasuk Indonesia dalam memasuki tahapan baru. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi yaitu pergeseran dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri, dilihat dari kontribusi nilai tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perubahan struktur ekonomi ini tentu membawa implikasi pada perubahan struktur ekonomi lainnya, seperti lapangan kerja, tuntutan angkatan kerja, struktur upah, dan struktur ekspor (Widodo, 1997:38).

Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1995-1997 didukung oleh sektor industri manufaktur dan bangunan. Kedua sektor ini bahkan memperlihatkan pertumbuhan diatas 10% sebagai bukti kekuatan domestik. Cukup tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut, seperti terdapat pada Produk domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lokasi menurut harga konstan tahun 1993, memperlihatkan semakin mantap dan meluasnya kegiatan ekonomi.

Pergeseran struktur ekonomi semakin jelas, semula lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian dan pertambangan, menjadi sektor industri dan jasa tersier seperti jasa perbankan, asuransi dan pariwisata. Pesatnya perkembangan industri pengolahan non migas yang ditunjang oleh peningkatan ekspor non migas secara

Tabel 4.2 Distribusi Persentase PDB Indonesia Tahun 1993 sampai dengan 1997 Menurut Lapangan Usaha Berdasar Harga Konstan (dalam persen)

Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	17,59	16,90	16,12	15,38	14,81
2. Pertambangan dan Pengalihan	13,86	9,48	9,25	9,07	8,84
3. Industri dan Pengolahan	21,10	23,56	23,88	24,68	25,07
4. Listrik, Gas, dan Air Minum	0,74	1,05	1,12	1,17	1,27
5. Bangunan	6,60	7,37	7,61	7,94	8,07
6. Perdagangan, hotel dan restoran	16,35	19,96	16,73	16,74	16,93
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,95	7,18	7,12	7,17	7,42
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,50	7,99	8,94	9,02	8,92
9. Jasa-jasa	10,31	9,51	9,23	8,83	8,67
PDB	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS), Indikator Ekonomi, 1993-1997

4.1.2 Penanaman Modal Asing (PMA)

Pada tahun 1987 untuk menarik penanaman modal asing (PMA) untuk melakukan investasi langsung, pemerintah memberikan izin kepada perusahaan asing untuk berusaha dibidang perdagangan ekspor dan menggunakan tenaga ahli asing serta menyederhanakan persyaratan untuk mendapatkan perilaku yang sama dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Perusahaan penanaman modal asing (PMA) tertentu, dapat didirikan dengan penyertaan saham nasional yang lebih kecil. Perusahaan-perusahaan penanaman modal asing (PMA) disamping dapat mengekspor produknya sendiri, juga diberikan kesempatan untuk mengekspor produk perusahaan lain. Pemerintah juga memberikan kesempatan untuk mendirikan perusahaan yang khusus melakukan perdagangan ekspor produk industri pengolahan. Perkembangan nilai penanaman modal asing (PMA) di Indonesia pada tahun 1993-1997, dapat dilihat pada tabel 4.3.

Peranan investasi dari penanaman modal asing (PMA) terhadap total investasi pada tahun 1993-1997, menunjukkan perkembangan yang rata-rata semakin meningkat. Peningkatan investasi dari penanaman modal asing (PMA) pada tahun tersebut mencapai angka pertumbuhan rata-rata 13%.

Proporsi sumbangan penanaman modal asing (PMA) terhadap investasi total Indonesia pada awalnya jumlahnya tidak terlalu besar dibanding dengan PMDN. Namun tiap tahunnya jumlahnya semakin meningkat, bahkan dapat melebihi jumlah kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap total investasi tahun 1993-1997. Pada periode tersebut pertumbuhan penanaman modal asing (PMA) pernah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu pada tahun 1994 sebesar 243%, dan tahun 1995 sebesar 52,6%. Peningkatan nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung besarnya arus masuk penanaman modal asing seperti kebijaksanaan dan deregulasi pada tahun sebelumnya. Misalnya kebijaksanaan Mei 1989 yang memuat daftar skala prioritas (DSP) tentang kegiatan yang dinyatakan tertutup dan terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing (PMA) dan daftar negatif (DNI) yang berisi 76 bidang dagang yang tertutup bagi penanaman modal asing

(PMA). Kebijakan tersebut memberikan peluang yang lebih luas dan pasti bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Pada tahun 1994, pemerintah telah mengeluarkan PP no. 20/1994 dalam rangka menghadapi era persaingan global di bidang investasi, dengan mengizinkan penanaman modal asing (PMA) menguasai 100% saham usahanya di Indonesia (Prasetyantono, 1995:348). Deregulasi ini mengatur mengenai izin penguasaan asing sampai 100% dari pemilikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan media massa.

Investasi sangat rentan sekali dengan beberapa faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhannya menurun. Penurunan laju pertumbuhan penanaman modal asing (PMA) pernah dialami pada tahun 1993 sebesar 19,2% dibandingkan tahun 1992. Hal ini disebabkan dua faktor yaitu pertama, investasi dari Jepang dan negara-negara industri baru lainnya mengalami penurunan. Di negara-negara ASEAN lainnya juga mengalami penurunan nilai penanaman modal asing (PMA). Kedua, meningkatnya persaingan dengan Cina, India, Vietnam yang terus memperbaiki iklim investasinya yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk intensif, dan kemudahan-kemudahan tata niaga. Upah tenaga kerja yang sering dianggap sebagai keunggulan komparatif di Indonesia, mulai tergeser oleh Cina dan India dengan populasi penduduk terbesar di dunia (Naga, 1995: 5 dan 9).

Berdasarkan tabel 4.4, perkembangan nilai penanaman modal asing (PMA) di Indonesia dilaksanakan pada semua sektor penanaman modal. Artinya tiap sektor di Indonesia, dapat melaksanakan pengembangan pada sektor masing-masing dengan menggunakan dana yang ditanamkan oleh investor asing tersebut. Selain itu secara keseluruhan, sektor-sektor tersebut sangat menjanjikan keuntungan bagi para investor. Kepercayaan investor tersebut juga didukung pertumbuhan masing-masing sektor pada waktu sebelumnya, dan prospeknya di

masa yang akan datang. Namun ada beberapa sektor yang pertumbuhannya lebih tinggi dari sektor-sektor lainnya. Sektor itu antara lain perindustrian yang menduduki peringkat teratas. Sektor industri memiliki proporsi nilai yang cukup tinggi terhadap total penanaman modal asing (PMA), yaitu besarnya rata-rata mencapai 62%. Situasi ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi di sektor industri yang juga meningkat, dan perubahan struktur ekonomi Indonesia dimana secara bertahap menjadi negara semi industri. Perhatian pemerintah yang besar terhadap pengembangan sektor industri juga menjadi pertimbangan bagi investor asing dalam menanamkan modalnya.

Penyebaran penanaman modal asing menurut tabel 4.4, terlihat tidak merata. Penanaman modal asing (PMA) tersebut cenderung terpusat pada daerah-daerah tertentu di pulau Jawa. Jumlahnya terus meningkat. Daerah-daerah yang lain jarang sekali menjadi lokasi penanaman modal asing terutama daerah Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur. Pada tahun 1989, daerah-daerah itu sama sekali tidak tersentuh penanaman modal asing (PMA) dibanding daerah lainnya, seperti Sulawesi dan Kalimantan yang masih mendapat perhatian dari investor asing, walaupun jumlahnya relatif kecil. Akibatnya daerah-daerah tersebut sangat lambat pertumbuhan ekonominya. Namun pada tahun 1996, lokasi-lokasi tersebut mendapatkan aliran masuk penanaman modal asing (PMA). Dimana sebagian besar penanaman modal asing (PMA) disalurkan pada sektor-sektor, seperti pertambangan, dan penggalian, serta sektor jasa masyarakat, sosial, dan perumahan yang banyak terdapat diluar pulau Jawa, dan nilainya meningkat hampir 100% dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 Daftar Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor Ekonomi (dalam milyar rupiah)

Sektor	1993	1994	1995	1996	1997
1. Pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan	344,22	1.605,56	883,66	3.651,84	1.391,10
2. Pertambangan dan penggalan	0	0	0	4.072,32	4,80
3. Perindustrian	7.359,02	49.209,16	61.851,83	38.573,04	69.051,90
4. Listrik, gas dan air	4.892,54	5.274	8.142,69	9.140,40	3.119,70
5. Konstruksi	208,34	168,30	473,34	712,32	920,40
6. Perdagangan besar dan eceran, restoran dan hotel	2.338,13	946,66	2.367,39	4.228,08	1.416,00
7. Transport, pergudangan dan perhubungan	183,61	319,22	12.740,85	1.667,04	17.700,00
8. Lembaga keuangan, perasuransian, real estate, dan jasa perusahaan	1.285,70	2.260,06	2.810,60	7.200,72	4.192,80
9. Jasa masyarakat sosial dan perorangan	898,49	393,14	281,75	2.582,88	1.300,80
TOTAL	17.510,03	60.177,26	91.872,81	71.828,40	101.497,5

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS), Indikator Ekonomi tahun 1993-1997

1997, dan kemudian disusul sektor pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 29.615,6 milyar pada tahun yang sama. Dimana lima tahun sebelumnya, untuk sektor perindustrian sebesar Rp 19.079,2 milyar atau naik sebesar 63% tiap tahunnya, dan sektor pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 2.485,3 milyar atau naik sekitar 109% tiap tahunnya.

Distribusi penanaman modal dalam negeri juga tidak merata pada setiap lokasi di Indonesia. Berdasarkan daftar penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui pemerintah menurut lokasi (tabel 4.6), dapat dilihat bahwa daerah yang mendapat saluran penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah pulau Jawa. Namun proporsinya terhadap total penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak terlalu besar. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) ini apabila dibandingkan dengan penanaman modal asing (PMA), distribusinya lebih merata. Sehingga memberikan kesempatan kepada daerah lain untuk menikmati manfaat penanaman modal di daerahnya. Dengan adanya penanaman modal tersebut diharapkan daerah yang bersangkutan dapat berkembang, sehingga perkembangan tiap lokasi di Indonesia dapat lebih merata. Penyebab tidak meratanya penyebaran investasi di Indonesia pada setiap lokasi yang ada, atau lebih cenderung terpusat di pulau Jawa, karena tidak meratanya jaringan infrastruktur di Indonesia. Pulau Jawa memiliki jaringan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap dibandingkan daerah lainnya, sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di pulau Jawa.

Tabel 4.4 Daftar Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah Berdasarkan Lokasi (dalam milyar rupiah)

Lokasi	1993	1994	1995	1996	1997
1.Jawa	14.104,65	31.583,86	63.231,60	42.980,16	61.605,00
2.Sumatra	2.941,20	20.027,36	12.636,20	10.314,48	33.491,11
3.Kalimantan	27,52	4.528,26	3.793,39	6.896,64	3.168,30
4.Sulawesi	86,43	3.186,26	5.484,12	6.126,24	1.278,30
5.Bali & Nusa Tenggara	110,73	80,30	744,78	4.236,00	387,90
6.Maluku, Irian Jaya & Tim-tim	226,61	681,78	5.971,72	1.274,88	1.566,90
TOTAL	17.510,03	60.177,26	91.872,81	71.828,40	101.497,50

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS), Indikator Ekonomi, 1993-1997

4.1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kebijaksanaan tentang penanaman modal ditetapkan melalui Undang-Undang No.6 tahun 1968, tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN), kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No.6 tahun 1970. Selama hampir tiga repelita, sifat investasi Indonesia umumnya berorientasi pada pasar dalam negeri dan bertujuan dalam menghasilkan barang-barang substitusi impor. Kemudian dikembangkan proyek-proyek yang memproduksi barang-barang untuk digunakan sebagai bahan baku industri substitusi impor, yang berarti masih berorientasi dalam negeri. Sedangkan penanaman modal pada umumnya masih bersifat usaha sektor primer.

Berdasarkan sektor ekonomi (tabel 4.5), kedudukan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sama dengan penanaman modal asing (PMA). Dimana penanaman modal dalam negeri (PMDN), sebagian besar ditujukan pada sektor industri. Nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk sektor industri lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya, khususnya industri kimia dan farmasi, serta industri tekstil. Besarnya nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk industri ini adalah Rp 79.334,3 milyar pada tahun

Tabel 4.5 Daftar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor Ekonomi (dalam milyar rupiah)

Sektor	1993	1994	1995	1996	1997
1. Pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan	3.093,50	7.401,00	10.097,00	32.142,80	29.615,60
2. Pertambangan dan penggalan	69,20	112,40	295,10	460,10	126,30
3. Perindustrian	24.032,10	31.921,70	43.341,80	59.217,70	79.334,30
4. Listrik, gas dan air	5,30	11,70	619,80	3.485,50	11.151,20
5. Konstruksi	186,50	731,10	8.478,00	1.550,00	877,00
6. Perdagangan besar dan eceran, restoran dan hotel	3.176,60	4.344,60	3.944,90	5.151,20	2.632,80
7. Transport, pergudangan dan perhubungan	3.827,40	3.119,8	3.965,90	3.065,00	4.649,40
8. Lembaga keuangan, perasuransian, real estate, dan jasa perusahaan	4.392,90	3.803,80	5.337,10	9.425,70	4.300,50
9. Jasa masyarakat sosial dan perorangan	667,80	1.843,00	1.493,60	2.288,60	1.993,70
TOTAL	29.450,40	53.289,10	69.853,00	100.715,2	119.872,9

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS), Indikator Ekonomi, tahun 1993-1997

Tabel 4.6 Daftar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah Berdasarkan Lokasi (dalam milyar rupiah)

Lokasi	1993	1994	1995	1996	1997
1. Jawa	27.378,00	36.466,00	41.807,10	43.710,40	63.680,80
2. Sumatra	4.073,70	8.518,60	14.076,00	24.095,50	33.761,80
3. Kalimantan	3.377,50	4.113,70	8.379,00	18.432,40	13.935,70
4. Sulawesi	1.138,90	1.656,80	2.710,80	6.272,90	3.859,90
5. Bali & Nusa Tenggara	561,10	1.785,50	1.525,80	805,90	2.073,10
6. Maluku, Irian Jaya & Tim-tim	2.621,20	748,50	2.355,30	7.398,10	2.771,60
TOTAL	39.150,40	53.289,10	70.854,00	100.715,20	119.909,00

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS), Indikator Ekonomi, 1993-1997

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Regresi dari Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penanaman modal asing terhadap pembentukan PDB di Indonesia dari tahun 1993/I sampai dengan 1997/IV. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka digunakan analisis regresi berganda dengan persamaan :

$$Y = 27.594,589 + 2,157X_1 + 1,165X_2$$

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap pembentukan PDB di Indonesia dan secara rinci dapat dijelaskan bahwa :

- a. nilai intercept sebesar 27.594,589 mempunyai arti bahwa tanpa adanya variabel PMA dan PMDN sebagai faktor yang mempengaruhi PDB, maka jumlah PDB bernilai positif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar PMA dan PMDN.
- b. variabel bebas PMA (X_1) mempunyai koefisien regresi positif sebesar 2,157 yang berarti apabila PMA bertambah atau meningkat maka diharapkan akan

terjadi peningkatan pada nilai PDB. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 6 diperoleh angka elastisitas yang positif sebesar 42,88%.

- c. variabel bebas PMDN (X_2) mempunyai koefisien regresi positif sebesar 1,165 yang berarti apabila PMDN bertambah atau meningkat maka diharapkan akan terjadi peningkatan pada nilai PDB. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 6 diperoleh angka elastisitas yang positif sebesar 25,16%.

4.2.2 Pengujian Statistik

1. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (t-test)

Untuk menguji pengaruh masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi parsialnya dan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak maka perlu diuji dengan uji t dua arah dengan derajat keyakinan 95%. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Analisis Varians Pengujian Regresi Secara Parsial

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	T-hitung	T-tabel	Kesimpulan
X_1	2,157	4,050	$\pm 2,110$	Signifikan
X_2	1,165	2,363	$\pm 2,110$	Signifikan

Sumber: Lampiran 2

Dari tabel 4.7 maka pengujian hipotesis tersebut dapat dilakukan pada masing-masing variabel bebas sebagai berikut:

- uji t dua arah dengan derajat kebebasan $df = n - k = 20 - 3 = 17$ dan tingkat kepercayaan 95% pada variabel bebas PMA (X_1) terhadap variabel terikat PDB (Y) sesuai dengan hasil perhitungan memberikan hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan kata lain bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa X_1 mempunyai pengaruh secara nyata (*signifikan*) terhadap besarnya PDB.
- uji t dua arah dengan derajat kebebasan $df = n - k = 20 - 3 = 17$ dan tingkat kepercayaan 95% pada variabel bebas PMDN (X_2) terhadap variabel terikat

PDB (Y) sesuai dengan hasil perhitungan memberikan hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan kata lain bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa X_2 berpengaruh secara nyata (*signifikan*) terhadap besarnya PDB.

2. Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (F-test)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas (PMA dan PMDN) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB. Adapun untuk menguji hal tersebut digunakan analisis Uji F atau dikenal dengan nama F test. Dari hasil perhitungan pada lampiran 2 dengan menggunakan probabilitas (*Level of Significant*) 95% atau derajat kesalahan 5% pada df (*degree of freedom*) = $n-k = 20-3=17$ ternyata F_{hitung} (51,30) lebih besar dari F_{tabel} (3,59). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara nyata (*signifikan*) H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa secara bersama-sama dan nyata variabel PMA dan PMDN mempunyai pengaruh terhadap variabel PDB.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besarnya kontribusi koefisien regresi yaitu X_1 dan X_2 terhadap variasi atau besar kecilnya PDB digunakan koefisien determinasi (R^2). Hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi keseluruhan (R Squared atau R^2) sebesar 0,86 yang menunjukkan derajat hubungan yang sebenarnya antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. R^2 yang besarnya 0,86 ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas (PMA dan PMDN) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel terikat (PDB) sebesar 86%. Perubahan variabel terikat (PDB) disebabkan oleh perubahan variabel bebas (PMA dan PMDN) secara bersama-sama sedangkan sisanya sebesar 14% disebabkan oleh variabel lain yang berada di luar jangkauan penelitian ini atau variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

4.2.3 Pengujian Ekonometrika

1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau kombinasi linier antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lainnya dalam penelitian. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas diperoleh dari nilai R^2 ; hasil regresi turunan antara X_i dengan variabel penjelas yang lain. Apabila F_i hitung $>$ F tabel maka X_i berkorelasi dengan variabel penjelas yang lain atau terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Berdasarkan pengolahan data yang tercantum pada lampiran 3 dapat diketahui bahwa F tabel (3,59) lebih kecil dari F_i hitung (31,57) hasil estimasi, maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas (PMA dan PMDN).

2. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam persamaan regresi digunakan uji Durbin-Watson. Berdasarkan pengolahan data yang tercantum pada lampiran 4 diketahui uji Durbin-Watson adalah 1,74. Dengan batas bawah (d_l) 1,00 dan batas atas (d_u) 1,54 maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian gangguan berbeda dari satu observasi ke observasi yang lain. Untuk pengujian heteroskedastisitas digunakan Uji Park. Berdasarkan pengolahan data yang tercantum pada lampiran 5 nilai t hitung dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:



Tabel 4.8 Hasil Regresi Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}
PMA (X_1)	0,85	$\pm 2,110$
PMDN (X_2)	-1,57	$\pm 2,110$

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan t_{hitung} masing-masing variabel lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5 % dan derajat kebebasan 17. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi tidak mengandung heteroskedastisitas.

4.3 Pembahasan

Perekonomian Indonesia secara makro menunjukkan adanya peningkatan yang baik yang ditandai dengan perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator ekonomi pertumbuhan ekonomi. Hal itu dapat dilihat dari hasil analisa regresi linier berganda yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas (PMA dan PMDN) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Menurut aliran Neoklasik dan Strukturalis, meningkatnya produktivitas suatu masyarakat akan terwujud apabila didukung dengan pembentukan modal yang akan menambah ataupun mengganti faktor-faktor produksi yang ada. Akibatnya kenaikan hasil produksi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan masyarakat akan meningkatkan jumlah tabungan dan jumlah tabungan akan meningkatkan investasi dan seterusnya.

Kegiatan penanaman modal baik PMA maupun PMDN perlu terus ditingkatkan karena kegiatan penanaman modal memberi pengaruh positif terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber modal untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda (lampiran 2), diperoleh angka koefisien regresi PMA (X_1) sebesar 2,157 dan angka koefisien

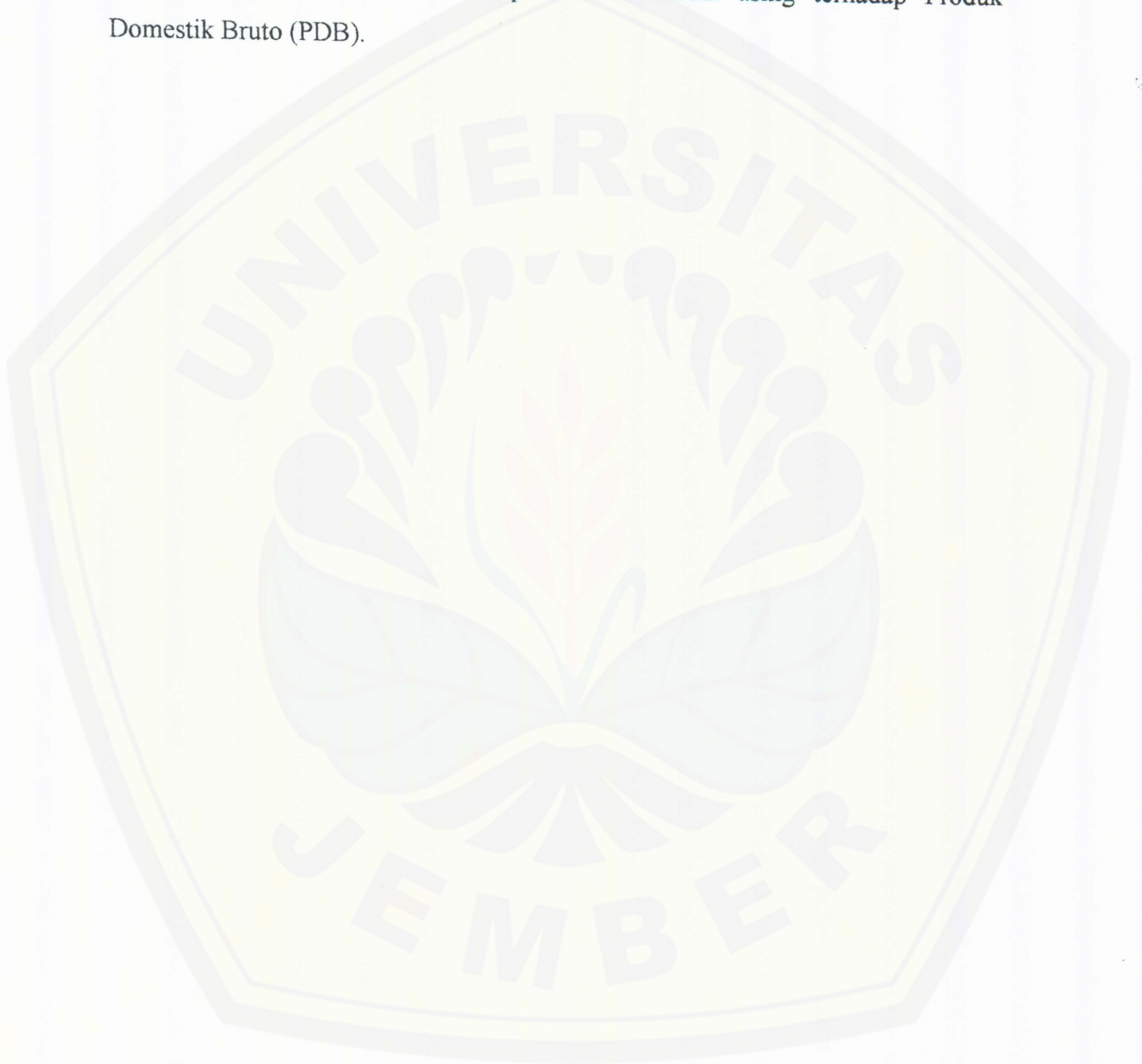
regresi PMDN (X_2) sebesar 1,165. Hasil perhitungan tersebut didukung dengan hasil uji t dan uji F yang signifikan pada tingkat keyakinan 95%.

Nilai-nilai koefisien tersebut diperluas dan diintegrasikan menjadi koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas PMA sebesar 42,88 menunjukkan bahwa apabila nilai PMA bertambah 1% maka pembentukan PDB diharapkan meningkat sebesar 0,4288%. Sedangkan elastisitas PMDN sebesar 25,16 menunjukkan bahwa apabila nilai PMDN bertambah 1% maka pembentukan PDB diharapkan meningkat sebesar 0.2516%.

Hasil analisis data tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian dan mendukung pendapat orang-orang Liberalis yang menyatakan bahwa penanaman modal asing berdampak positif atau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB). Kebijakan pemerintah untuk lebih meningkatkan peranan penanaman modal dalam pembangunan sebaiknya harus diikuti dengan tindakan pengawasan dalam hal penggunaannya. Hal ini disebabkan, selain memberi pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kegiatan penanaman modal ini juga bisa memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dengan adanya penanaman modal maka tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan penanaman modal tersebut akan meningkat. Apabila tingkat konsumsi masyarakat meningkat maka tingkat tabungan dalam negeri yang diciptakan masyarakat akan berkurang, sedangkan untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan modal yang besar.

Melihat kenyataan bahwa banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia hingga saat ini masih mengalami keterbatasan akan faktor-faktor produksi yang sangat krusial untuk melakukan kegiatan produksi, di antaranya modal maka arus modal dari luar negeri khususnya dalam bentuk penanaman modal asing sangatlah penting. Penanaman modal asing merupakan salah satu motor penggerak pembangunan atau pertumbuhan ekonomi (*engine of power*). Pentingnya penanaman modal asing di dalam suatu ekonomi, seperti Indonesia, dapat dilihat dengan menggunakan beberapa indikator makro, seperti laju

pertumbuhan nilai yang disetujui atau realisasinya setiap tahun, laju perkembangan penanaman modal asing terhadap laju perkembangan total investasi (termasuk penanaman modal dalam negeri), rasio laju perkembangan penanaman modal asing terhadap laju perkembangan penanaman modal dalam negeri dan persentase dari nilai penanaman modal asing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa nilai elastisitas penanaman modal asing sebesar 42,88 menunjukkan bahwa apabila nilai penanaman modal asing bertambah 1% maka pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan meningkat sebesar 0,4288%. Sedangkan nilai elastisitas penanaman modal dalam negeri sebesar 25,16 menunjukkan bahwa apabila nilai penanaman modal dalam negeri bertambah 1% maka pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan meningkat sebesar 0,2516%. Nilai elastisitas penanaman modal asing lebih besar dari nilai elastisitas penanaman modal dalam negeri yang berarti bahwa pengaruh penanaman modal asing terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia lebih besar daripada pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dilihat dari perbandingan elastisitas keduanya.

5.2 Saran

Dari analisis data dan simpulan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. terus melakukan deregulasi yang konsisten dan terencana serta melakukan fungsi kontrol sehingga dapat menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi
2. meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana (baik fisik dan non fisik) yang menunjang kegiatan pembangunan agar lebih merata ke seluruh tanah air
3. menciptakan iklim investasi yang menarik, prosedur yang sederhana, dan pelayanan yang lancar
4. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing karena salah satu dampak adanya penanaman modal asing adalah transfer teknologi
5. menjaga kestabilan kondisi keamanan dalam negeri yang bertujuan membangun rasa kepercayaan investor
6. tetap memperhatikan dampak negatif dari adanya penanaman modal asing seperti yang dikemukakan orang-orang Neomarxis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, 1993, **Metodologi Penelitian Ekonomi**, Jakarta: Penelitian Ekonomi
- Biro Pusat Statistik (BPS), 1993-1997, **Indikator Ekonomi**, Jakarta
- Budiman, Arief, 1995, **Teori Pembangunan Dunia Ketiga**, Jakarta: Gramedia
- Damanhuri, D dan Santosa, B, 1997, **Fundamental Ekonomi Indonesia**, Bisnis dan Ekonomi Politik Vol. 1 No. 4
- Dumairy, 1999, **Perekonomian Indonesia**, Jakarta: Erlangga
- Gilarso, T, 1992, **Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro**, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Ikbar, Yanuar, 1995, **Ekonomi Politik Internasional**, Bandung: Penerbit Angkasa
- Jinghan, ML, 1999, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, Jakarta: BPFE UI
- Kamaluddin, Rustian, 1998, **Pengantar Ekonomi Pembangunan**, Jakarta: BPFE UI
- Kuncoro, Mudrajat, 1997, **Ekonomi Pembangunan**, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Makmun, Murod, 1997, **“Pengaruh PMDN dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 1984 sampai dengan 1994”**, Skripsi, Unej, Tidak Dipublikasikan
- Naga, F.S, 1995, **“Menarik Investor Asing”**, Suara Karya, 9 Mei Hal 5 dan 9
- Prasetiantono, A.T, 1995, **Agenda Ekonomi Indonesia**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Raharjo, Dawam, 1994, **Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis**, Jakarta: LP3ES
- Senghaas, Dieter, 1988, **Tata Ekonomi Dunia Dan Politik Pembangunan**, Jakarta: LP3ES
- Sudarman, Ari, 1992, **Teori Ekonomi Mikro Buku II Edisi Ketiga**, Yogyakarta: BPFE UGM

Sugiyanto, Catur, 1994, **Ekonometrika Terapan**, Yogyakarta: BPFE

Sukirno, S, 1985, **Ekonomi Pembangunan, Prospek, Masalah dan Dasar Kebijakan**, Jakarta: PT. Kreasi Jaya Utama

Supranto, J, 1995, **Ekonometrika**, Jakarta: BPFE UI

Supriyanto dan Sampurna, A, 1999, **Utang Luar Negeri Indonesia**, Jakarta: Djambatan

Tambunan, Tulus, 1998, **Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi**, Jakarta: BPFE UI

Widiyawati, Etik, 1999, **“Pengaruh PMA dan PMDN Pada Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Indonesia Tahun 1987 sampai dengan 1996”**, Skripsi, Unej, Tidak Dipublikasikan

Widodo, S.T, 1997, **Ekonomi Indonesia Fakta dan Tantangan Dalam Era Liberalisasi**, Yogyakarta: Kanisius



Lampiran 1: Data Analisis Regresi Variabel PMA (X_1) dan PMDN (X_2) terhadap PDB (Y)

obs	PDB	PMA	PMDN
1993.1	34127.80	4768.320	7352.410
1993.2	34660.50	4507.780	7359.200
1993.3	35193.10	4247.240	7366.000
1993.4	35725.70	3986.690	7372.790
1994.1	85694.80	11044.26	11087.40
1994.2	87888.10	13710.97	12577.31
1994.3	91143.00	16377.67	14067.24
1994.4	90004.70	19044.37	15557.15
1995.1	92363.60	19996.75	19016.12
1995.2	94340.40	21977.72	17980.87
1995.3	98293.70	23958.69	16945.63
1995.4	98595.20	25939.66	15910.39
1996.1	98431.40	19836.26	22285.47
1996.2	100422.2	18583.49	24214.36
1996.3	107102.6	17878.80	26143.25
1996.4	107962.7	16077.94	28072.13
1997.1	106756.5	22592.90	28172.19
1997.2	109758.7	24447.22	29369.55
1997.3	109729.6	26301.54	30566.90
1997.4	109440.9	28155.85	31764.26

Lampiran 2: Hasil Persamaan Regresi Berganda Variabel PMA (X_1) dan PMDN (X_2) terhadap PDB (Y).

LS // Dependent Variable is PDB
 Date: 7-18-2000 / Time: 6:08
 SMPL range: 1993.1 - 1997.4
 Number of observations: 20

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	27594.589	6322.2059	4.3647090	0.0004
PMA	2.1574943	0.5326916	4.0501755	0.0008
PMDN	1.1650827	0.4930466	2.3630278	0.0303
R-squared	0.857877	Mean of dependent var	86381.76	
Adjusted R-squared	0.841157	S.D. of dependent var	27430.75	
S.E. of regression	10932.57	Sum of squared resid	2.03E+09	
Log likelihood	-212.7436	F-statistic	51.30733	
Durbin-Watson stat	0.716220	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 3: Pengujian Kemungkinan adanya Multikolinieritas terhadap Variabel PMA (X_1) dan PMDN (X_2).

LS // Dependent Variable is PMA
 Date: 7-27-2000 / Time: 6:39
 SMPL range: 1993.1 - 1997.4
 Number of observations: 20

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	3389.3408	2680.9172	1.2642467	0.2223
PMDN	0.7386431	0.1314655	5.6185306	0.0000
R-squared	0.636862	Mean of dependent var		17171.71
Adjusted R-squared	0.616687	S.D. of dependent var		7813.285
S.E. of regression	4837.381	Sum of squared resid		4.21E+08
Log likelihood	-197.0077	F-statistic		31.56789
Durbin-Watson stat	0.557180	Prob(F-statistic)		0.000025

Lampiran 4: Pengujian Kemungkinan adanya Autokorelasi terhadap Variabel PMA (X_1) dan PMDN (X_2)

LS // Dependent Variable is ABSU
 Date: 7-27-2000 / Time: 7:11
 SMPL range: 1993.1 - 1997.4
 Number of observations: 20

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	0.3413910	0.0836850	4.0794750	0.0008
PMDN	-1.193E-05	6.526E-06	-1.8286488	0.0851
PMA	8.476E-06	7.051E-06	1.2020242	0.2458
R-squared	0.171793	Mean of dependent var		0.264248
Adjusted R-squared	0.074357	S.D. of dependent var		0.150411
S.E. of regression	0.144711	Sum of squared resid		0.356001
Log likelihood	11.90676	F-statistic		1.763135
Durbin-Watson stat	1.744651	Prob(F-statistic)		0.201456



Lampiran 5: Pengujian Kemungkinan adanya Heteroskedastisitas terhadap
Variabel PMA (X_1) dan PMDN (X_2)

LS // Dependent Variable is LUK

Date: 7-27-2000 / Time: 7:09

SMPL range: 1993.1 - 1997.4

Number of observations: 20

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-1.8937774	0.8051143	-2.3521846	0.0310
PMA	3.949E-05	6.784E-05	0.5820777	0.5682
PMDN	-9.869E-05	6.279E-05	-1.5717505	0.1344
R-squared	0.179332	Mean of dependent var	-3.057137	
Adjusted R-squared	0.082783	S.D. of dependent var	1.453701	
S.E. of regression	1.392231	Sum of squared resid	32.95121	
Log likelihood	-33.37173	F-statistic	1.857416	
Durbin-Watson stat	1.914605	Prob(F-statistic)	0.186390	

Lampiran 6: Perhitungan Elastisitas Pengaruh PMA Terhadap Pembentukan PDB Indonesia Tahun 1993/I sampai dengan 1997/IV

Berdasarkan data-data pada lampiran 2 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nilai rata-rata PMA (X_1) = 17.171,706
- b. Nilai rata-rata PMDN (X_2) = 18.659,031
- c. Nilai rata-rata PDB (Y) = 86.381,76

Hasil perhitungan elastisitas:

1. Penanaman modal asing

$$E_1 = b_1 \cdot \frac{X_1}{Y}$$

$$E_1 = 2,157 \cdot \frac{17.171,706}{86.381,76}$$

$$= 0,4288$$

$$= 42,88 \%$$

2. Penanaman modal dalam negeri

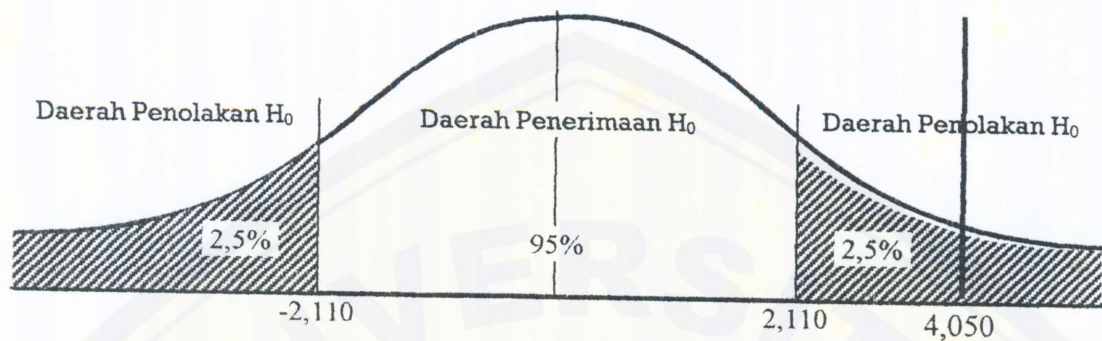
$$E_2 = b_2 \cdot \frac{X_2}{Y}$$

$$E_2 = 1,165 \cdot \frac{18.659,031}{86.381,76}$$

$$= 0,2516$$

$$= 25,16 \%$$

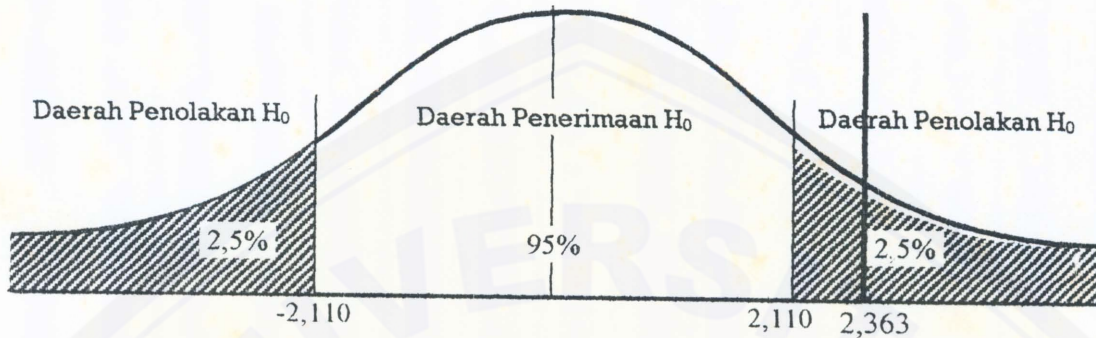
Lampiran 7: Kurva Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji-t Dua Arah Pada Tingkat Keyakinan 95% untuk Variabel Bebas X_1 (PMA)



- $H_0 : \beta_0 = 0$ secara parsial variabel bebas X_1 berpengaruh terhadap variabel terikat di mana $-t_{\alpha/2} < t_{\text{hitung}} < t_{\alpha/2}$
 $H_0 : \beta_0 \neq 0$ secara parsial variabel bebas X_1 tidak berpengaruh terhadap variabel terikat di mana $-t_{\alpha/2} < t_{\text{hitung}} < t_{\alpha/2}$

Gambar di atas menjelaskan bahwa nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ sehingga H_0 ditolak, berarti variabel PMA mempunyai pengaruh terhadap pembentukan PDB di Indonesia.

Lampiran 8: Kurva Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji-t Dua Arah Pada Tingkat Keyakinan 95% untuk Variabel Bebas X_2 (PMDN)



$H_0 : \beta_0 = 0$ secara parsial variabel bebas X_2 berpengaruh terhadap variabel terikat di mana $-t_{\alpha/2} < t_{\text{hitung}} < t_{\alpha/2}$

$H_0 : \beta_0 \neq 0$ secara parsial variabel bebas X_2 tidak berpengaruh terhadap variabel terikat di mana $-t_{\alpha/2} < t_{\text{hitung}} < t_{\alpha/2}$

Gambar di atas menjelaskan bahwa nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ sehingga H_0 ditolak, berarti variabel PMDN mempunyai pengaruh terhadap pembentukan PDB di Indonesia.